MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1034 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;

b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2022

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 1034 TAHUN 2022

TENTANG : UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022

NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	Badan Informasi Geospasial
3	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4	Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
5	Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Badan Narkotika Nasional
6	Balai Besar POM di Makassar	Badan Pengawas Obat dan Makanan
7	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
9	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10	BPS Kabupaten Jembrana	Badan Pusat Statistik
11	BPS Kota Tasikmalaya	Badan Pusat Statistik
12	BPS Kabupaten Boalemo	Badan Pusat Statistik
13	BPS Kabupaten Klungkung	Badan Pusat Statistik
14	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Pusat Statistik
15	BPS Provinsi Jambi	Badan Pusat Statistik
16	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi	Badan Standardisasi Nasional
17	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia	Badan Standardisasi Nasional
18	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	Kejaksaan Agung
19	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus	Kementerian Agama
20	Madrasah Aliyah Negeri Karangasem	Kementerian Agama
21	Kantor Pertanahan Kota Kupang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
24	Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
26	Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
27	Museum Geologi - Badan Geologi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28	Rupbasan Kelas II Blitar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
29	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
30	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
31	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
32	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Kementerian Kelautan dan Perikanan
33	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Kementerian Kelautan dan Perikanan
34	Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta	Kementerian Kesehatan
35	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town	Kementerian Luar Negeri
36	Politeknik Pariwisata Bali	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
38	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
39	Balai Sains Bangunan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
40	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
42	Balai Bahasa Provinsi Bali	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
43	Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
44	Balai Standardisasi Metrologi Legal I	Kementerian Perdagangan
45	Balai Standardisasi Metrologi Legal IV	Kementerian Perdagangan
46	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
47	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Guntur Melati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	Kementerian Perhubungan
48	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Kementerian Perhubungan
49	Politeknik Transportasi Darat Bali	Kementerian Perhubungan
50	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam	Kementerian Perindustrian
51	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	Kementerian Perindustrian
52	Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar	Kementerian Perindustrian
53	Balai Diklat Industri Makassar	Kementerian Perindustrian
54	Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Makassar	Kementerian Perindustrian
55	Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan	Kementerian Pertahanan
56	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	Kementerian Pertanian
57	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	Kementerian Pertanian

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
58	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Kementerian Sekretariat Negara
59	Biro SDM Polda Sulsel	Kepolisian Negara Republik Indonesia
60	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Komisi Pemilihan Umum
61	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
62	Direktorat Sertifikasi Profesi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
63	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Mahkamah Agung
64	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	Mahkamah Agung
65	Pengadilan Tinggi Agama Medan	Mahkamah Agung
66	Pengadilan Agama Mimika	Mahkamah Agung
67	Pengadilan Agama Unaaha	Mahkamah Agung
68	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Mahkamah Konstitusi
69	Brigif Para Raider 18/Trisula Divif 2 Kostrad	Tentara Nasional Indonesia
70	Lanud Roesmin Nurjadin	Tentara Nasional Indonesia
71	Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut)	Tentara Nasional Indonesia
72	Pusdikarhanud Pussenarhanud Kodiklatad (Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara)	Tentara Nasional Indonesia
73	Puspomad (Pusat Polisi Militer TNI AD)	Tentara Nasional Indonesia
74	Pussenarmed (Pusat Kesenjataan Artileri Medan) Kodiklatad	Tentara Nasional Indonesia
75	UPTD Puskesmas Mengwi I	Pemerintah Kabupaten Badung
76	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
77	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	Pemerintah Kabupaten Boyolali
78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
79	Puskesmas Bareng	Pemerintah Kabupaten Jombang
80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Kebumen
81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Kediri
82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Lumajang
83	UPT Puskesmas Penanggal	Pemerintah Kabupaten Lumajang
84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Magetan
85	RSUD Dr. Soeroto	Pemerintah Kabupaten Ngawi
86	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Pacitan
87	Puskesmas Gemaharjo	Pemerintah Kabupaten Pacitan
88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Pemerintah Kabupaten Pasuruan
90	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
91	Kecamatan Taman	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Trenggalek
93	Puskesmas Trenggalek	Pemerintah Kabupaten Trenggalek
94	Kecamatan Kepanjenkidul	Pemerintah Kota Blitar
95	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	Pemerintah Kota Bontang

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Pemerintah Kota Kediri
97	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kota Malang
98	Puskesmas Gedongan	Pemerintah Kota Mojokerto
99	Puskesmas Kanigaran	Pemerintah Kota Probolinggo
100	Puskesmas Sukabumi	Pemerintah Kota Sukabumi
101	Kecamatan Banjarsari	Pemerintah Kota Surakarta
102	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek, Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
1	Auditorat Utama Investigasi	Badan Pemeriksa Keuangan
2	BPK Perwakilan Provinsi Riau	Badan Pemeriksa Keuangan
3	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	Badan Pemeriksa Keuangan
4	BPK Perwakilan Provinsi Jambi	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Kementerian Agama
7	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali	Kementerian Agama
8	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9	Politeknik STTT Bandung	Kementerian Perindustrian

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA INSTANSI PEMERINTAH
10	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang	Kementerian Pertanian
11	Polres Barito Selatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia
12	Polres Kulon Progo	Kepolisian Negara Republik Indonesia
13	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Mahkamah Agung
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Pemerintah Kabupaten Wonogiri
15	RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak	Pemerintah Kota Pontianak
16	Kecamatan Kademangan	Pemerintah Kota Probolinggo
17	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Pemerintah Provinsi Bali

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS